



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 22
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: 1. Menteri Agama RI. 2. Menteri Sosial RI. 3. Menteri PPPA RI. 4. Kepala BNPB.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 20 September 2021.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Penyesuaian RKA K/L TA 2022
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 43 dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 7 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Agama RI, Beserta Jajaran. 4. Menteri Sosial RI, Beserta Jajaran. 5. Menteri PPPA RI, Beserta Jajaran. 6. Kepala BNPB, Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB.

Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan Kepala BNPB membahas “**Penyesuaian RKA K/L Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI**” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Mitra Komisi VIII DPR RI Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI sebagai berikut:

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	JUMLAH
1	Kementerian Agama RI	Rp. 66.453.208.486.000,-
2	Kementerian Sosial RI	Rp. 78.256.327.121.000,-
3	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Rp. 252.693.956.000,-
4	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rp. 1.127.245.196.000,-
TOTAL		Rp.146.089.474.759.000,-

2. Dalam rangka meningkatkan target sasaran Tahun 2022, Komisi VIII DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran dari Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI baik yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), *refocusing* dan/atau dari APBN Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut:

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	USUL PENAMBAHAN
1	Kementerian Agama RI	Rp. 13.326.879.505.000,-
2	Kementerian Sosial RI	Rp. 25.809.385.200.000,-
3	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Rp. 70.000.000.000,-
4	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rp. 650.335.211.000,-
TOTAL		Rp. 39.856.599.916.000,-

3. Dalam rangka penyempurnaan RKA K/L Tahun 2022, Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan Kepala BNPB agar memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
- a. Meningkatkan proporsionalitas anggaran antara satuan kerja di Kementerian dan Lembaga.
 - b. Mendorong pemenuhan hak-hak keuangan bagi para guru honorer, guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan guru *inpassing* baik di sekolah madrasah negeri maupun swasta dengan menyesuaikan kondisi keuangan negara.
 - c. Meminta Kementerian Agama RI untuk lebih meningkatkan perhatian kepada madrasah swasta baik sarana maupun prasarananya.
 - d. Memastikan penyaluran program bantuan sosial berbasis geografis dan demografis.
 - e. Mempercepat realisasi anggaran untuk bantuan anak yatim dari keluarga prasejahtera dan yang terdampak Covid-19.
 - f. Meningkatkan sinergi program yang dilaksanakan di daerah berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan Anggota Komisi VIII DPR RI.
 - g. Meningkatkan kerjasama Kementerian Agama RI dengan pondok-pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya dalam rangka mensukseskan tujuh program prioritas Kementerian Agama RI Tahun 2022.
 - h. Meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak untuk meningkatkan sinergi dengan Kementerian dan Lembaga dalam rangka penanganan dan perlindungan perempuan dan anak.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.12 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,



H.YANDRI SUSANTO, SPt.